

STRENGTHENING SCHOOL-BASED MANAGEMENT FOR BUILDING DEMOCRACY IN EDUCATION

Charles, M.Pd.I
IAIN Bukittinggi
charlesmalinkayo@yahoo.co.id

Abstract: Democracy in education is one of obligations in order to build human who have democracy and tolerant characters. This statement does not mean that the government does not have any authority in education, but it means that the government shares it definitely and proportionally with school and society to run the school management. To build a democratic education, It needs the regulators, professionalism and management. Regulation aspect is pointed on curricula reformation that is related to the aims of education, the implementation of curricula based competence, the change of teacher performance paradigm from responsibility into accountability and evaluation which have basic concept of education based on society, essay and portfolio. Professionalism aspect is aimed for taking the authority and rights back to the teachers in doing their education task. In the other side, education management aspect is aimed to change understanding and control of education. The concept of school based management offers a better education for students. It indicates that autonomy in management is a potential for school to improve staff works, offer a direct participation from any related groups and improve society comprehension for education. Through redirecting the authority, it is expected that school can get such societies participation to play the role in developing the school till it becomes theirs. Here, it is expected that there will be a growth of own feeling of school by the society so that the committee of school have caring for the education.

Key words: school based management, education democracy

1.0 PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan pencerminan kondisi negara dan kekuatan sosial – politik yang tengah berkuasa. Pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada. (Karini Kartono 1997) Masalah pendidikan akan menjadi masalah politik apabila pemerintah ikut serta terlibat di dalamnya. Bahkan menurut Michael W.Apple sebagaimana dikutip H.A.R Tilaar, kurikulum pendidikan yang berlaku sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sarana rekayasa dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaannya. Oleh karena itu, masalah pendidikan sesungguhnya adalah masalah politik, tapi bukan dalam artian yang praktis. Diakui oleh Paulo Freire, sekolah memang merupakan alat kawalan sosial yang efisien bagi upaya untuk menjaga statu qua. Di negara otoriter yang menganut paham pemerintah totalitarianisme, pemerintah akan membatasi menganut paham pemerintah totalitarianisme, pemerintah akan membatasi kebebasan individu dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan yang uniform bagi semua

anak didik. Bagi Negara semacam ini, pendidikan adalah kekuatan politik untuk menominasi rakyat. Pemerintah secara mutlak mengatur pendidikan yang uniform untuk semua anak didik. Sebagai respon terhadap pandangan ini, muncul paham pemerintahan yang mengharapkan konsep Negara demokrasi, yang menghendaki adanya demokratisasi dalam pendidikan.

Demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan, agar dapat melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Reformasi pendidikan melalui demokrasi pendidikan, menurut Zamroni (t.t:127-130) dapat dilakukan dalam tiga aspek pendidikan, yaitu regulatori, profesionalitas, dan manajemen. Aspek regulatori dititik beratkan pada reformasi kurikulum yang berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, penerapan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*), pergeseran paradigma kerja guru dari *responsibility kearah Acauontability* dan pelaksanaan evaluasi dengan Konsep Dasar pendidikan Berbasis Masyarakat esei dan potro polio.

Aspek profesionalitas ditunjukkan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Aspek ini dapat ditempuh melalui pengembanaan kesadaran hak-hak politik guru untuk mengembangkan dirinya. Sedangkan aspek manajemen pendidikan ditunjukkan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan dan kendali pendidikan. Reformasi aspek manajemen ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan pendidikan. bentuk kenijakan ini adalah menumbuhkan manajemen berbasis sekolah (*school- basic management*); *Kedua*, memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini dapat dirujuk dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*).

Tulisan ini dengan telah filosofis bermkasud untuk mengungkap ide-ide dan konsep-konsep dasar yang terkandung dalam pendidikan berbasis masyarakat. Apa dan bagaimana pendidikan berbasis masyarakat itu? mengapa ia perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan?

2.0 DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan ditanganrakyat. demokrasi dewasa ini telah diterima oleh hamper seluruh bentuk pemerintahan di dunia. Demokrasi menurut Masykuri Abdillah memiliki tiga unsure utama yaitu adanya kemauan politik (*political society*) dan adanya *civil society* yang kuat dan mandiri. Ketiga unsure ini doproses dalam sebuah Negara yang menjamin adanya kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan pemilihan umu yang bebas dan bertanggung jawab. Selain itu, demokrasi juga memiliki dua norma baku yang berlaku bagi setiap bentuk "demokrasi", yaitu *public accountability* (pertanggung jawaban kepada rakyat) dan *contestability* (uji kesahihan apakah demokrasi itu bercermin kepada kehendak bersama atas nama kepentingan yang lain). Oleh karena itu, demokrasi dalam arti modrn, sebagaimana dikemukakan Magnis-Suseno dalam Tamara dan Taher, sering dipahami sesebagai sebuah system politik yang melambangkan control terhadap pemerintah rakyat (kedaulatan rakyat), serta kewajiban pemerintahan untuk member petanggung jawaban (*accaountability*) kepada rakyat melalui system perwakilan.

Jadi, di dalam demokrasi modern terdapat dua kategori prinsip, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pertanggungjawaban melalui perwakilan.

Demokratisasi artinya proses menuju demokrai. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana paling saling strategis bagi penciptaan demokratisasi. Dalam pandangan Azyumardi Azra, cara paling strategis untuk “mengalami demokrasi” (*experiencing democracy*) adalah melalui apa yang disebut dengan *democracy edication*. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai sosialisasi, melalui pendidikan. Selanjutnya Azzara menegaskan dalam banyak hal, pendidikan demokrasi identik dengan “pendidikan kewargaan” (*civic education*), meskipun pendidikan kewargaan negara lebih luas cakupan dari pada pendidikan demokrasi. Namun yang jelas, keduanya berupaya menumbuhkan *civic culture* dan *civitily* di lingkungan pendidikan, yang pada gilirannya akan menjadi ontribusi penting bagi pengembangan demokrasi yang genuine dan otentik pada neagara-bangsa Indonesia. Sejalan dengan pendapat Azra, Syafi’I Ma’arif (dalam zamroni, t.t: viii-ix) mengemukakan bahwa proses penciptaan mentalitas dan kultural demokrsi kiranya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam kaitan ini, perwujudan sistem pendidikan yang demokratis merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan.

Demokratisasi pendidikan mengandung arti proses menuju demokrasi dalam bidang pendidikan. Demokrasi pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ‘Demokrasi pendidikan’ dan “pendidikan demokrasi”. Demokrasi pendidikan, sebagaimana telah disinggung pada awal tulisan ini, dapat diwujudkan di antaranya melalui penerpan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasioanal. Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di tingkat nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan. Inilah yang disebut demokrasi pendidikan menurut kartono.

Adapun pendidikan demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan ditingkat lokal. Di dalam pendidikan demokrasi, proses pembelajaran di kelas dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keadaban. Fungsi pendidikan dalam proses pembelajaran yang demokratis adalah sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan motivator. sebagai fasilitator, pendidik harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Sebagai dinamisator, pendidik harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Sebagai mediator, pendidik harus memberikan rambu-rambu atau arahan agar peserta didik bebas belajar. sebagai motivator, pendidik harus selalu meberikan dorongan agar peserta didik harus selalu memberikan dorongan agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu.

Pendidikan demokrasi menentukan adanya perubahan asas *subject matter oriented* menjadi *student oriented*, yaitu bagaimana membebani peserta didik dengan informasi-informasi kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan psikologis mereka. dengan orientasi seperti ini dapat dihasilkn lulusan yang pandai, cerdas, dan terampil, tetapi kepandaian dan kecerdasan emosional.

Keadaan demikian terjadi karena kurangnya perhatian terhadap ranah efektif. Padahal ranah efektif sama penting perannya dalam membentuk perilaku peserta didik.

Suasana pendidikan yang demokratis senantiasa memperhatikan aspek egalitarian (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan) antara pendidik dengan peserta didik. Pelajaran tidak harus top down, namun dibahagi dengan bottom down, namun diimbangi dengan bottom up. Dengan komunikasi struktural dan cultural antara pendidik dan peserta didik, maka akan terjadi interaksi yang sehat, wajar, dan bertanggung jawab. Peserta boleh saja berpendapat, berperasaan dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri, asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,. Peserta didik bukan saja memahami demokrasi tetapi juga menjalani latihan seperti berdebat.

3.0 SCHOOL BASED MANAGEMENT

Managemen sekolah sangat berbeda dengan manajemen bisnis dan merupakan bagian dari management Negara. Namun, management sekolah tidak persis sama dengan management Negara. Kalau management Negara mengejar kesuksesan program baik rutin maupun pembangunan, maka management sekolah mengejar kesuksesan perkembangan anak manusia melalui pelayanan-pelayanan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, mengambil bisnis maupun management Negara tidak dapat diterapkan begitu saja dalam dunia pendidikan.

Pengertian management Berbasis Sekolah (MSB) sangat terkait pada istilah manajemen menurut kartono sebagai penyelenggaraan usaha penyusunan dan pencapaian hasil yang diinginkan dengan menggunakan upaya kelompok, terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya manusia.

Dengan manajemen memungkinkan terjadinya usaha dan kegiatan yang mengarah pada tujuan organisasi. Menurut pendapat Hasibuan merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Asnawir memandang manajemen sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha untuk memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama.

Dengan manajemen yang baik maka tujuan yang akan dicapai dapat diukur. Manajemen yang diperlukan untuk merumuskan tujuan organisasi, menetapkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu, mengkomunikasikan kepada orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan dan menetapkan bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa manajemen itu diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Dari pengertian manajemen tersebut diatas, maka bila menghubungkan dengan pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) hal ini sangat berdekatan, karena antara pengelolaan sebuah sekolah sudah barang tentu menyangkut segala perencanaan dan pelaksanaan sekolah, dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen berbasis sekolah mengandung pengertian pemberian otonomi kepada sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah, untuk manajemen pendidikan dan penyelenggaraan sekolah.

Beberapa ahli memberi batasan tentang pengertian MBS sesuai dengan sudut pandang masing-masing sehingga telah terjadi perbedaan, namun intinya terdapat kesamaan. Pendapat E.Mulyasa MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi

pendidikan yang menawarkan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Hal ini mengisyaratkan bahwa otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

Kemudian Wohlstetter dan Moharman berpendapat bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu pendekatan politik yang populer untuk mendesain ulang yang memberi para partisipasi sekolah lokal, kekuatan untuk manajemen pengambilan keputusan kepada stakeholder lokal, yang benar-benar berada di ujung tombak, diberdayakan untuk berbuat sesuatu tentang bagaimana sekolah berperilaku.

School-based management is a popular political approach to redesign that gives local school participant-educator, parents, students and community at large the power to improve their school. By moving governance and management decisions to local stakeholders, those with the most at stake are empowered to do something about how the school is performing.

Cotton berpendapat MBS upaya-upaya terdahulu untuk mendesentralisasikan dimaksudkan untuk menggeser otoritas (kewenangan) dari dewan pendidikan yang besar dan sentral kepada dewan-dewan pendidikan yang lebih local.

Previous attempts to decentralize were aimed at shifting authority from a large, central board of education to smaller, local boards. Replacing one form of bureaucracy with another. Past reform avoided a transfer of power to the school site ... SBM is different ... it changes the entire system of district and school organization and restructures most roles in the district. (upaya-upaya terdahulu untuk mendesentralisasikan dimaksudkan untuk menggeser otoritas (kewenangan) dari dewan pendidikan yang besar dan sentral kepada dewan-dewan pendidikan yang lebih kecil dan lokal... untuk menggantikan suatu birokrasi dengan yang lain. Reformasi yang telah lampau menghindari pemindahan kekuatan dan kekuasaan kewenangan sekolah... manajemen berbasis sekolah berbeda Ia mengubah seluruh sistem distrik dan organisasi sekolah, dan menstrukturisasikan hanya peran yang distrik).

Pendapat Nanang Fatah : MBS merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite, sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Selanjutnya, Candoli dalam Abu-Duhou mendefinisikan MBS, sebagai berikut :

... a way for forcing individual their jurisdiction and attending their school. The concept suggest that, when individual schools are charged with the total development of educational programmes aimed at serving the needs of the children in attendance at that particular school, the school personnel will develop more congenial programmes because they know the student and their needs..

Salah satu cara untuk memaksa individu sekolah-sekolah agar bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada anak-anak yang ada di bawah kekuasaan mereka dan memasuki sekolah mereka. konsep ini menyarankan bahwa individu sekolah-sekolah diberi tanggungjawab penuh untuk mengembangkan program pendidikan yang dimaksud dalam melayani kebutuhan anak-anak yang memasuki sekolah itu, maka personel sekolah akan mengembangkan program lebih mantap karena mereka menegenal siswa dan kebutuhannya.

Lebih jauh Bedjo Sudjanto menitik beratkan dari sudut pandang keterkaitan kebijakan : MBS dengan unsure masyarakat merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Di samping itu, MBS juga mendorong penegmbalian keputusan partisipatif yang melibatkan lansung semua warga sekolah yang dilayani dengan selaras pada kebijakan nasional pendidikan.

Pendekatan MBS ini sebenarnya telah berkembang cukup lama, tetapi merupakan hal yang baru bagi Negara Indonesia. Pada 1988 American Association Of School Administratos, Natoinal Association Of Elementarry School Principals, and Natoinal Associationof Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul School Based management, a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan sebagian pengelola pendidikan yang tingkat bawah (sekolah) Kepala sekolah merasa tak berdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap kontek pendidikan semakin dikerdilakn denagn rutinitas urusan birokrasi yang mengumpulkan kreativitas berinovasi. Manajemen berbasis sekolah telah dikembangkan ditempat-tempat seperti inggris atau seperti Selandia Baru atau Victoria, Australia atau di beberapa sistem sekolah yang besar) di Kanada dan Amerika dimana terdapat pengalaman sejenis selama lebih dari satu decade.

Manajemen Berbasi Sekolah (MBS) atau school based menegement, (SBM) merupakan istilah yang baru di NKRI sering dengan desentralisasi pendidikan. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai dipertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Dari berbagai pendapat dan pandangan ahli tersebut diatas, dapat diapahami bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah suatu bentuk dan model pendidikan yang seharusnya di lakukan oleh masing-masing sekolah tanpa adanya tekanan dari unsure pemerintahan. Denagn demikian penerkan MBS di diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan peranserta masyarakat sesuai kondisi mesing-masing dapat menerapkan metode yang tepat dan input lain yang tepat pula sesuai dengan lingkungan dan kontek sosial budaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga semua input terdapat guna dan tepat sasaran. Apalagi semenjak lahirnya UU RI.No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mejadi wujud otonomi daerah dan tentu saja berimbas kepada otonomi pendidikan baik tingkat Kabupaten/kota dan menurut Usman akhirnya berdampak sampai pada sekolah. Sehingga Depdiknas terdorong untu melakukan reorientasi menejemen sekolah dari manajemen pendidikan berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah /MBS (school Based Management /SBM) atau disebut juga sebagai Site based management yang diterapkan menjadi MBS.

Sehingga tentu saja jika MBS ini berhasil dengan baik ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan MBS anantara lain : 1) Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus memepunyai komitmen yang kuat dalam upaya mengerakan semua warga sekolah untuk ber-MBS ; 2) Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik

dan mental untuk ber-MBS; 3) Keterlibatan, pendidikan yang efektif yang melibatkan semua pihak dalam mendidik anak; 4) Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit yang terpenting bagi pendidikan yang efektif ;5) Keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang mengerti tentang pendidikan ;6) Kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum; 7) Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana; 7) Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan *stake holder* sekolah. Menurut Usman, Indikator MBS sudah berhasil disekolah ditunjukkan oleh beberapa hal : 1) Adanya kemandirian sekolah yang kuat ;2) Adanya kemintraan sekolah yang efektif ; 3) Adanya partisipasi yang kuat dari masyarakat ;4) Adanya keterbukaan yang bertanggung jawab dan meluas dari pihak sekolah dan masyarakat; 5) Adanya akuntabilitas yang dipertanggung jawabkan oleh sekolah.

4.0 MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM MENEJEMEN SEKOLAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa MBS lain seiring dengan lahirnya UU RI. No. 22 Tahun 1999 yang kemudian telah direvisi dengan lahirnya UU No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjadi wujud otonomi daerah dan tentu saja berimbas pada otonomi pendidikan baik tingkat Kabupaten/kota dan menurut Usman akhirnya berdampak sampai pada sekolah. Kemudian reformasi pendidikan juga ditandai dengan lahirnya UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Kemudian kedua undang-undang tersebut membawa perspektif baru yang amat revolusionisme dalam konteks perbaikan sektor pendidikan sebagai urusan publik dan urusan masyarakat secara umum dengan mengurangi otoritas pemerintah baik dalam kebijakan kurikulum, manajemen maupun berbagi kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri.

Otonomi daerah bidang pendidikan antara lain didasarkan pada permasalahan-permasalahan pendidikan yang terjadi selama ini yaitu : pertama, kurang terkoordinasinya pengelolaan pendidikan antara instansi (Depag, Diknas, Premda), kedua kebikajalan pendidikan (isi, misi,dst) yang tersentralisasi, perencanaan top down, ketiga manajemen sekolah tidak efektif, kepala sekolah kurang otonom. Sementara pelaksanaan otonom daerah sedang dalam proses penataan, bidang pendidikan perlu melangkah secara proaktif untuk melakukan peninjauan potensi yang ada. Tanpa mengabaikan dukungan pemerintah, peninjauan dukungan masyarakat agaknya perlu didahulukan. Hal ini menyangkut upaya kepala sekolah menjalin dan meningkatkan hubungan sekolah-masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sekaligus meningkatkan mutu.

Untuk merespon permasalahan-permasalahan di atas, maka lembaga pendidikan dapat mengembangkan “*School Based Management*” (SBM) sebagai salah satu alternatif sekolah dalam program otonomi bidang pendidikan. Konsep dasar School Based Management (SBM) adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/kanwil/kedep ke level sekolah. Oleh karena itu ada beberapa pakar, yang member istilah *school based decision making and management*. Dengan pengalihan wewenang pengambilan keputusan ke level sekolah diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat. Dalam

bahasa lain sekolah mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan program yang relevan, diharapkan sekolah akan mampu mengali partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam menegmbangkan sekolah, sehingga sekolah menjadi “milik” masyarakat. Disini diharapkan tumbuh “rasa memiliki” masyarakat. Oleh karena itu konsep Komite Sekolah, perlu dikembangkan dalam arti keanggotaan maupun perannya. Keanggotaan komite sekolah hendaknya mencakup masyarakat di luar orang tua murid. Dimasa datang akan di prediksi bahwa orang tua yang sudah tidak memiliki anak di sekolah, tetapi diharapkan memiliki potensi kepedulian terhadap pendidikan, sehingga terbentuklah sekolah yang membawa semangat demokrasi dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi pemyelenggaraan pendidikan disekolah. Di antara potensi yang memiliki sekolah adalah kekuatan yang ada pada masyarakat, bahwa disatu sisi Mayoritas masyarakat Indonesia Bergama islam yang memiliki ikatan emosional dan simbol-simbol keberagamaannya yang memanisfestasikan dengan menjafa dan mengembangkan simbol-simbol tersebut, dan sekolah merupakan salah satu simbol.

5.0 KESIMPULAN

Hakikat dari otonomi daerah adalah pemberian mandat sepenuhnya kepada masyarakat dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Sementara itu dilihat dari potensi dan peluang sekolah seperti disebutkan diatas, dimana sekolah sudah menjadi milik, dari, oleh dan untuk masyarakat, maka sekolah lebih memiliki kesiapan dibanding lembaga-lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian jika sekolah mampu membaca potensi dan peluang tersebut maka akan lebih dapat dinamis atau paling tidak akan eksis walaupun keberadaanya berada pada daerah kategori “miskin”.

6.0 BIBLIOGRAFI

- Asnawir, *Manajemen Pendidikan*, Padang, IAIN IB Pers, 2006
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarga Negara dan Demokrasi*, [http : // www.kompas.com /cetak/0103/14/opini/pend04.htm](http://www.kompas.com/cetak/0103/14/opini/pend04.htm). artikel ini telah dimuat pada harian kompas, 14 Maret 2001. Di akses 3 Mei 2012
- Bedjo Sudjanto, *Mensiasati Manajemen Berbasis Sekolah di Era Krisis Yang Berkepanjangan*.(Jakarta : ICW, 2004),
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi, Sebuah Meodel Perlibatan Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana ,2007)
- E.Mulyasa, *Manajemen Berbasi Sekolah: Konsep Startegi dan Implementasi* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2007)
- H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*. Cet.I: (Magelang: Indonesiatera, 2003)
- Hasibuan Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT.Gunung agung, 1995),
- Husaini Usman, *Manajmen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*.(Jakarta : Bumi Aksara, 2009)
- Usman, *Manajmen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*.(Jakarta : Bumi Aksara, 2009)

- Ibtisam Abu-Duhou, *School-Based Manajement* .(Paris : UNESCO. International Intitute For Education Planing,1999).
- Kartini kartono, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*.(Yogyakarta : BPFE,1994)
- Karini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa Kritik dan Sugesti*. Cet. I : (Jakarta:Pradnya Paramita,1997)
- Kathleen Cotton, *School-Based Management*, (school improvedment research series. Northwest Regoinal Education Laboratority.2001)
- Made Pidarta, *Peranan Kepala Sekolah Pada Pendidikan Dasar*.(Jakarta:PT.Gramedia Mediasarana Indonesia,1998
- Mansur Hamdan, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: P2LPTk, 1989)
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Tahap konsep Demokrasi (1966-1993)*, Alih Bahasa Wahib Wahab. Cet.I : Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999)
- Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, (Bandung : Pustaka Bani Qurays 2003)
- Paulo Freire, *Politik Pendidkan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Alih Bahasa Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudi – Yartanto. Cet, II: (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2000)
- Priscilla Wohltetter, and Susan Albers Worhman assesment of school-based management.(Los Angles : University of shouthern California,1996)
- Soetjipto wirosardjono, “Demokrasi” dalam Frans Magnis-Suseno dkk, dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi, Cet,II : (Jakarta :P3M-FNS,1994)
- Tamara dan Elza Peldi Taher (Eds.), *Agama dan Dialog Antar perbedaan*.Cet.I : (Jakarta : Paramadina,1996)
- Zamroni, *Pendidkan Untuk Demokrasi: Tantangan Untuk Menuju Civil Society*. Cet.I: Yogyakarta: Bigraf,t.t.h.viii-ix